



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019

TENTANG

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2020, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2020.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1546

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan menjadi penentu awal arah pembangunan agar diteruskan di tahun-tahun selanjutnya untuk keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode tersebut. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN sebelumnya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;

4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Rencana Kerja Pemerintah memiliki poin utama untuk mencapai tujuan kerja pemerintah setahun kedepan dengan membuat prioritas nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau *refocusing*. Pada Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, dan 23 Kegiatan Prioritas sedangkan di Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat di dalam Prioritas Nasional yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

II. SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

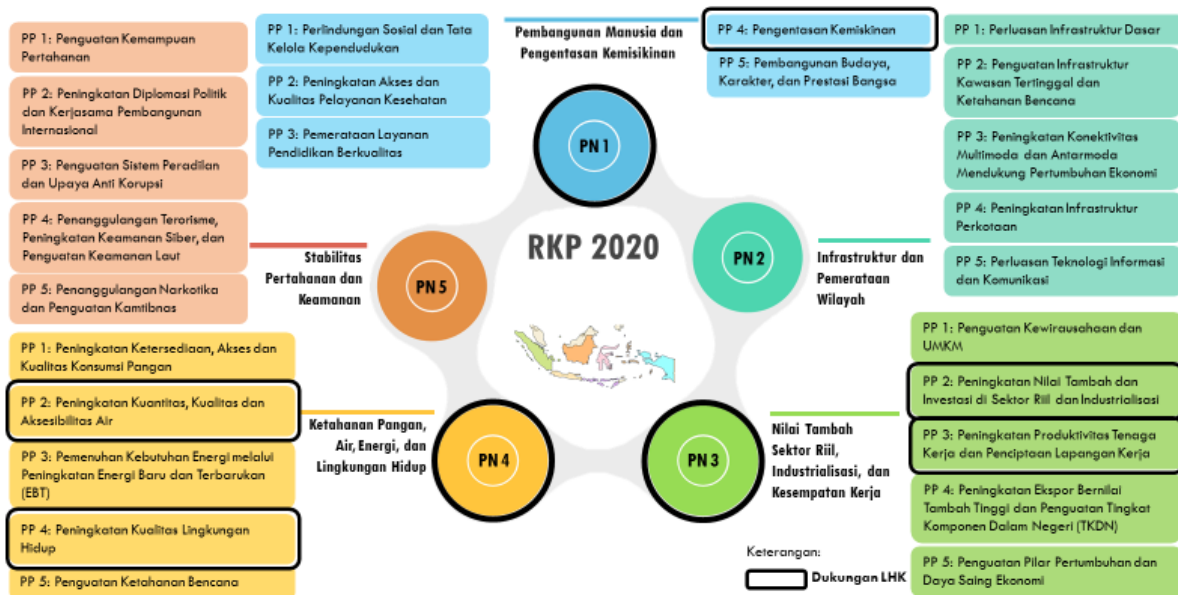
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020 berupa:

1. Peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM).
2. Mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung dan daya tampung berbagai kegiatan, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim. Menjaga luasan dan fungsi hutan juga menjadi peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered spesies*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran utama di Tahun 2020 untuk mempertahankan perannya berupa meningkatkan nilai produk domestik bruto sektor hulu 5-7% (lima sampai tujuh per seratus), indeks lingkungan hidup 67-68.5, dan laju deforestasi 300-400 (tiga ratus sampai empat ratus) ribu/tahun.

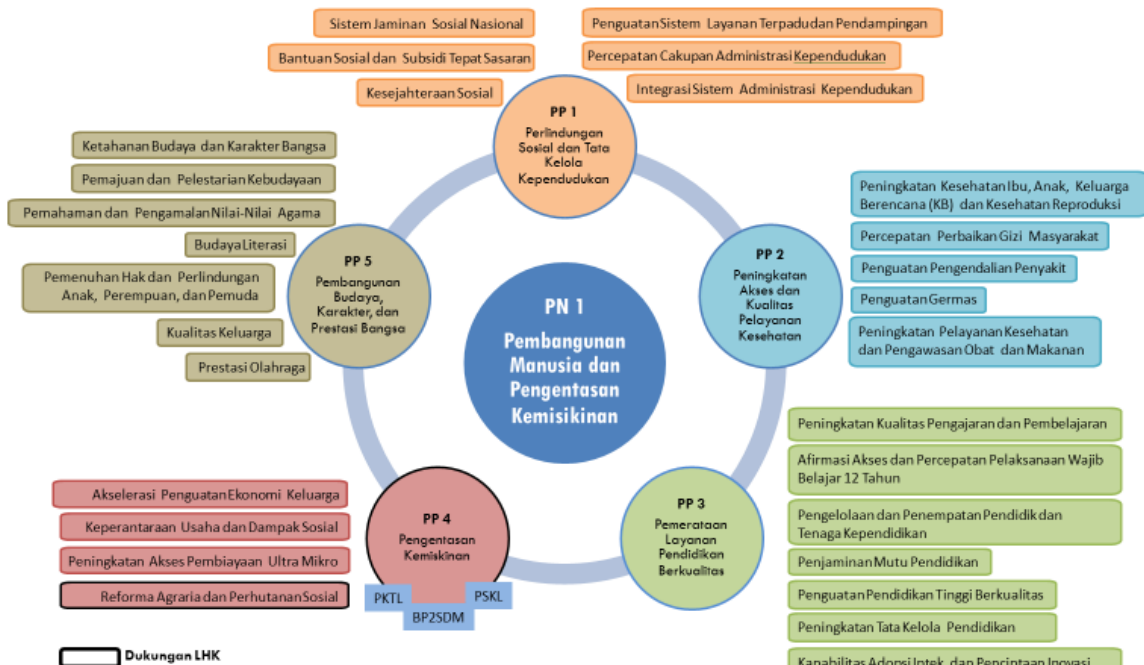
III. DUKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Nasional Tahun 2020 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional.



Gambar 1. Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN



Gambar 2. Kegiatan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 mendukung Prioritas Nasional I pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah pengembangan Iptek-inovasi bidang LHK, pelaksanaan reformasi agrarian, dan perhutanan sosial. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi untuk meningkatkan Iptek-inovasi agar menghilangkan kesan hutan tempat produksi menjadi pengembangan potensi hutan dari segala sektor untuk menciptakan hutan lestari yang melalui pengembangan Iptek-inovasi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kemitraan dengan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dalam bentuk Hutan Kemitraan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

Tabel 1. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|--|----------------------------------|--|---|---|---------------|
| 01- Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04- Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) | 002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA | 2.077.610,00 |
| | | | | 006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH | 80.769.555,00 |
| | | | | 011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | 917.950,00 |
| | | | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 001-Kasus konflik tenurial yang ditetapkan | 3.900.000,00 |
| | | | | 001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan | 1.744.370,00 |
| | | | | 001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS | 8.500.000,00 |
| | | | | 002-Kasus konflik tenurial yang ditangani | 4.200.000,00 |
| | | | | 003-Hutan Adat yang ditetapkan | 7.250.000,00 |
| | | | | 003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, | 26.662.680,00 |

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|--------------------|----|----|---|--|-----------------------|
| | | | | IPHPS | |
| | | | | 004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi | 7.500.000,00 |
| | | | | 007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga | 57.479.479,00 |
| | | | 05- Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya | 001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk | 10.000.000,00 |
| | | | 06- Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan | 002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan | 106.721.660,00 |
| | | | 07- Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial | 001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan | 6.625.000,00 |
| | | | | 001- Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat | 3.200.000,00 |
| | | | | 002-Kelompok Tani Hutan Mandiri | 4.100.000,00 |
| | | | | 002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial | 37.170.330,00 |
| | | | | 005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan | 21.700.000,00 |
| Total | | | | | 390.272.174,00 |

**Prioritas Nasional 3:
NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA**



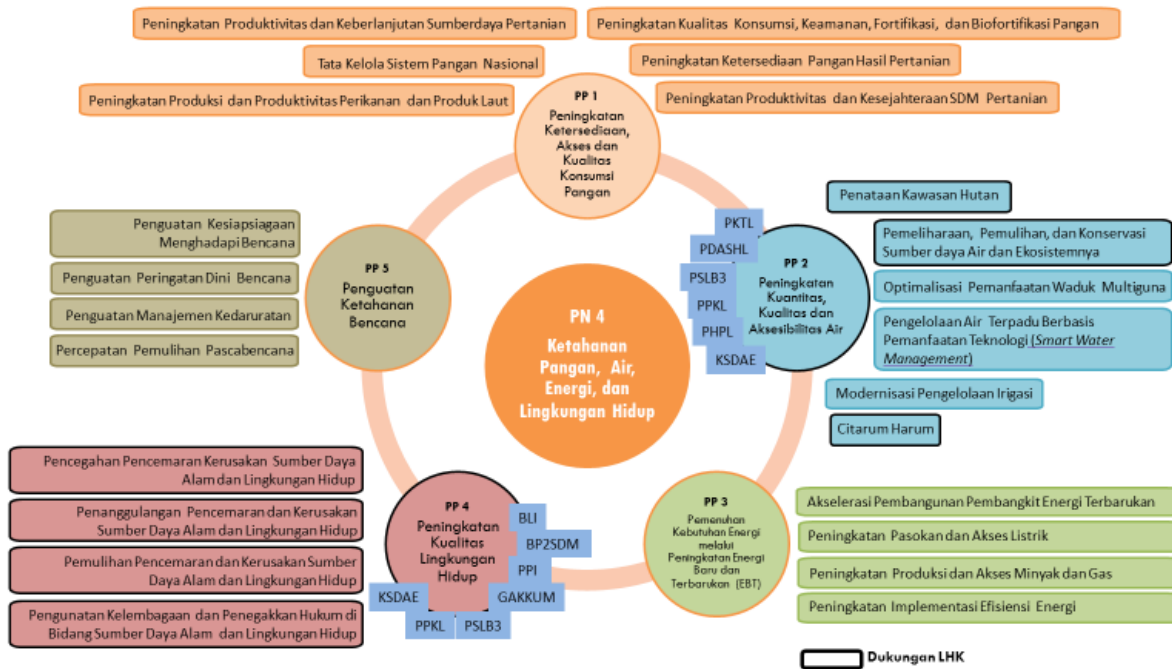
Gambar 3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja adalah optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNBK, Pengembangan model iptek di 7 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata, pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM yang siap kerja dibidang LHK. Kegiatan-kegiatan tersebut diperinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|--|---|---|--|--|-----------------------|
| 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | 01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir | 06-Optimalisasi Hasil Hutan | 001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNPB kehutanan | 2.999.750,00 |
| | | | | 001-Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan | 14.076.000,00 |
| | | | | 002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1.001.150,00 |
| | | | | 002-Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan | 3.000.000,00 |
| | | | | 002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan | 10.000.000,00 |
| | | | | 003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan | 2.248.600,00 |
| | | | | 001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan | 179.691.956,00 |
| | 04-Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok | 01-Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru | 004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN | 123.947.000,00 | |
| | 03-Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja | 02-Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia | 74.256.350,00 |
| | | | | | |
| Total | | | | | 412.970.806,00 |

Prioritas Nasional 4:
KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Gambar 4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Program Prioritas Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah dengan penetapan dan perlindungan kawasan lindung, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan DAS, dan revitalisasi danau. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pemantauan kualitas air, air laut, dan udara. Strategi tersebut diterjemahkan kedalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

Tabel 3. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------|
| 04- Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01- Penataan Kawasan Hutan | 01- Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) | 002- Luas Kawasan sebagai penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi | 6.869.300,00 |
| | | | | 003- Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi | 12.930.245,00 |

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|----------------|
| | | | | 006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi | 750.000,00 |
| | | | | 010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air | 1.500.000,00 |
| | | | | 011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH | 847.807,00 |
| | | | 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa | 001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi | 4.271.600,00 |
| | | | | 002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | 74.261.863,00 |
| | | | | 002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam | 8.619.796,00 |
| | | | | 002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya | 8.077.500,00 |
| | | | | 003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya | 119.361.961,00 |
| | | | 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi | 450.000,00 |

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|--------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | RPHJP | |
| | | | | 004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH | 13.652.323,00 |
| | | | | 007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project | 20.100.000,00 |
| | | | | 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH | 13.497.297,00 |
| | | 02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya | 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis | 002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif | 1.939.605.401,00 |
| | | | | 003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkatkan kapasitasnya | 7.167.572,00 |
| | | | | 003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis | 61.701.277,00 |
| | | 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air | 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air | 001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya | 120.888.741,00 |
| | | | | 07-Revitalisasi Danau | 005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat |
| | | 06-Citarum Harum | 02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi- Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV | 011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum | 12.090.790,00 |
| | | | | 03-Modernisasi Pengelolaan Sampah | 005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum |
| | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan | 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara | 003-Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi | 73.990.000,00 |

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|---|---------------|
| | | Lingkungan Hidup | | Lingkungan | | |
| | | | | 005-Data dan Informasi Kualitas Udara | 31.050.000,00 | |
| | | | | 006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | 15.229.600,00 | |
| | | | | 010-Data dan Informasi Kualitas Air | 96.439.210,00 | |
| | | | 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan | 004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | 150.502,813.00 | |
| | | | | 006-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 32.390.000,00 | |
| | | | 04-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup | 001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari | 5.977.760,00 | |
| | | | 05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem | 001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 87.591.893,00 | |
| | | | 02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut | 004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut | 22.600.000,00 |
| | | | | | 007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | 4.170.400,00 |
| | | | | 02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik | 001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional | 16.050.000,00 |
| | | 03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK | | 001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK | 12.000.000,00 | |
| | | 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis | | 004-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan | 76.140.000,00 | |
| | | | | 012-Fasilitas Pengendalian | 50.000.000,00 | |

| Prioritas Nasional | PP | KP | Pro Prioritas Nasional | Output | Total |
|---------------------------|-----------|--|---|--|-------------------------|
| | | | | Pencemaran Air | |
| | | 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01- Pemulihan Gambut | 001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi | 19.550.000,00 |
| | | | | 003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan | 300.000.000,00 |
| | | | 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 | 001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan | 57.138.675,00 |
| | | | | 003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi. | 23.350.000,00 |
| | | | 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut | 001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya | 5.900.000,00 |
| | | | | 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai | 25.151.840,00 |
| | | 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah | 001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim | 2.100.000,00 |
| | | | 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan | 67.465.000,00 |
| | | | | 001-USaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK | 52.830.000,00 |
| | | | 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 | 56.986.250,00 |
| | | | | 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan | 22.461.000,00 |
| Total | | | | | 3.749.980.339,00 |

IV. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2020 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 dan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Nomor S-704/MK.02/2019 dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

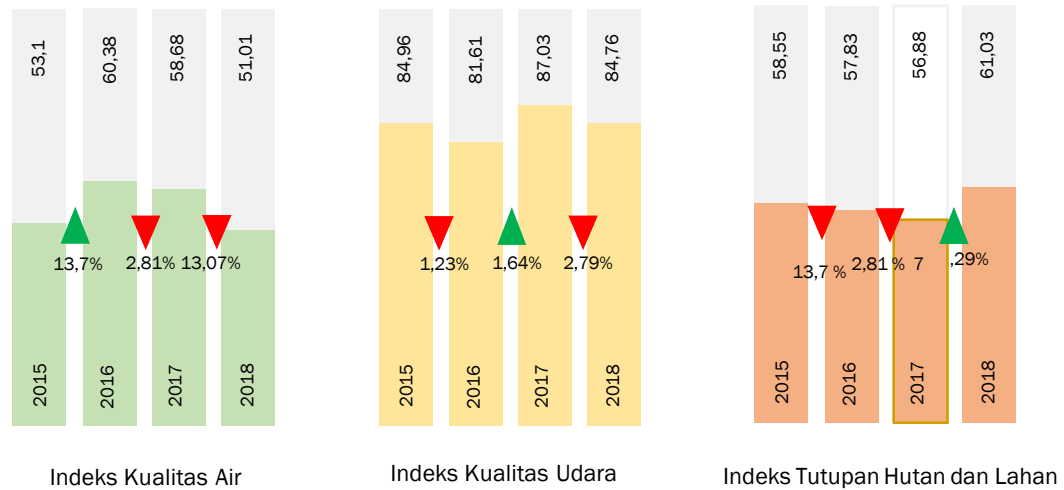
Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Program berdasarkan Pagu Alokasi

| Program | Alokasi (Ribu Rupiah) |
|---|----------------------------------|
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | 592.759.666,00 |
| Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 86.966.609,00 |
| Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan | 301.754.834,00 |
| Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung | 2.799.916.214,00 |
| Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | 2.049.226.996,00 |
| Program Planologi dan Tata Lingkungan | 480.427.464,00 |
| Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 393.833.245,00 |
| Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | 341.386.089,00 |
| Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan | 458.679.200,00 |
| Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 468.790.771,00 |
| Program Pengendalian Perubahan Iklim | 313.272.831,00 |
| Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | 361.844.139,00 |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 670.467.758,00 |
| Total | 9.319.325.816,00 |

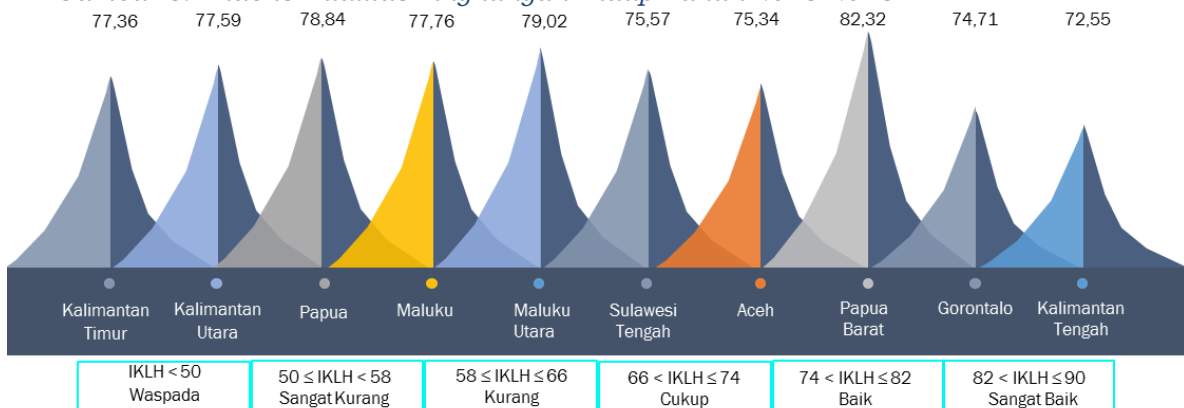
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup Indonesia Target Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 adalah 65-66,5. Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 65,14, namun menurun sebesar 1.98 % dibandingkan periode yang sama (Y o Y) di tahun sebelumnya. Kecenderungan ini dibangun dari anasir indeks kualitas air (Y o Y = -13.07 %), indeks kualitas udara (Y o Y = -2.79

%) dan indeks tutupan hutan dan lahan (Y o Y = 7.29 %). Persentase Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 100,22%. Nilai IKLH ini juga memenuhi 97.95% dari rentang rencana capaian dalam Renstra Tahun 2015-2019. Terdapat 10 provinsi dengan nilai IKLH tertinggi Tahun 2018 di Indonesia dengan katagori baik dan sangat baik. Provinsi Papua Barat memiliki nilai paling tinggi yaitu 82.32, diharapkan provinsi lain dapat meningkatkan nilai IKLH agar kualitas lingkungan Indonesia meningkat.



Gambar 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2018

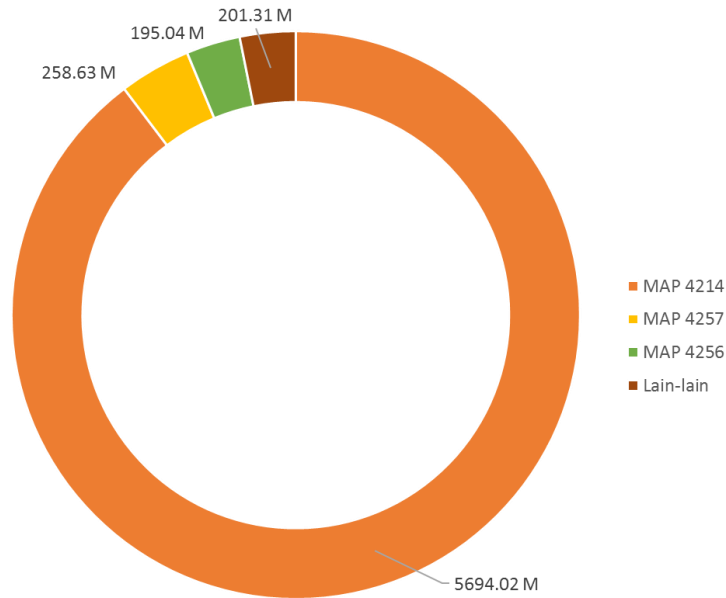


Gambar 6. 10 Provinsi dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tertinggi Tahun 2018

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah PNBPN Tahun 2018 sebesar Rp. 6,349 Triliun. Pendapatan Kehutanan terbesar berasal dari (MAP 4214) yang berasal dari Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi sebesar Rp. 5.694,02 Miliar. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (MAP 4257) sebesar Rp. 258,63 Miliar. Pendapatan Jasa yang berasal dari wisata, iuran, dan jasa bidang lingkungan hidup dan kehutanan (MAP 4256) sebesar Rp. 195,05 Miliar. Angka ini meningkat 22.05 % dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 208.16 %, Proporsi

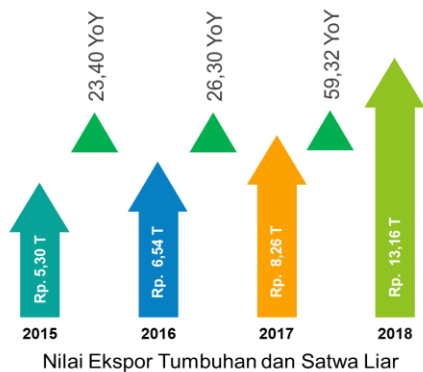
Capaian kumulatif Tahun 2015-2018 terhadap rencana capaian 2015-2019 sebesar 119.5 %.



Gambar 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018

EKSPOR HASIL HUTAN

Indeks Kinerja Utama 3 Nilai Ekspor disumbangkan dari kayu olahan dan TSL. Nilai kayu olahan Tahun 2018 sebesar US\$ 12.18 M sedangkan pada tahun 2017 sebesar US\$ 10,98 Miliar. Tahun 2016 Nilai Ekspor kayu sebesar 9,27 US\$ dan tahun 2015 sebesar 9,84 US\$. Sedangkan Ekspor TSL tahun 2015 sebesar 5,3 Trilyun Rupiah, Tahun 2016 sebesar 6,54 Trilyun Rupiah, tahun 2017 sebesar 8,26 Trilyun Rupiah, dan tahun 2018 sebesar 13.16 Trilyun Rupiah.

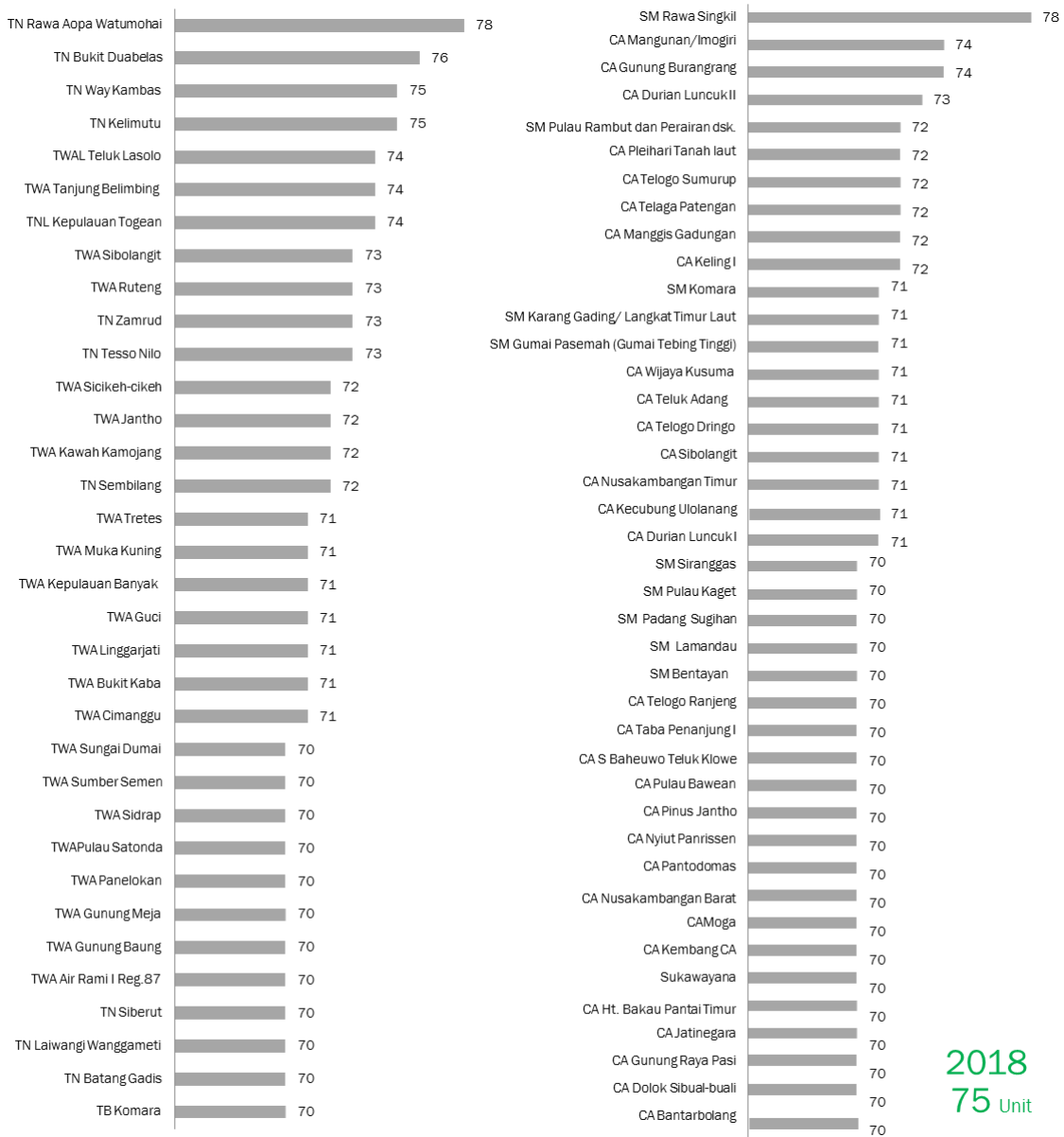


Gambar 8. Nilai Ekspor Kayu Olahan dan TSL Tahun 2015- 2018

KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI MINIMAL 70

Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan dengan adanya nilai *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT). Nilai METT

yang menunjukkan pengelolaan membaik pada setiap Kawasan konservasi harus memiliki nilai minimal 70. Nilai METT bertujuan menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan Konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan, sangat menentukan tidak hanya keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasannya tapi juga bagi daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional. Entitas pengukuran adalah Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Di luar KSA/KPA terdapat juga Taman Buru.



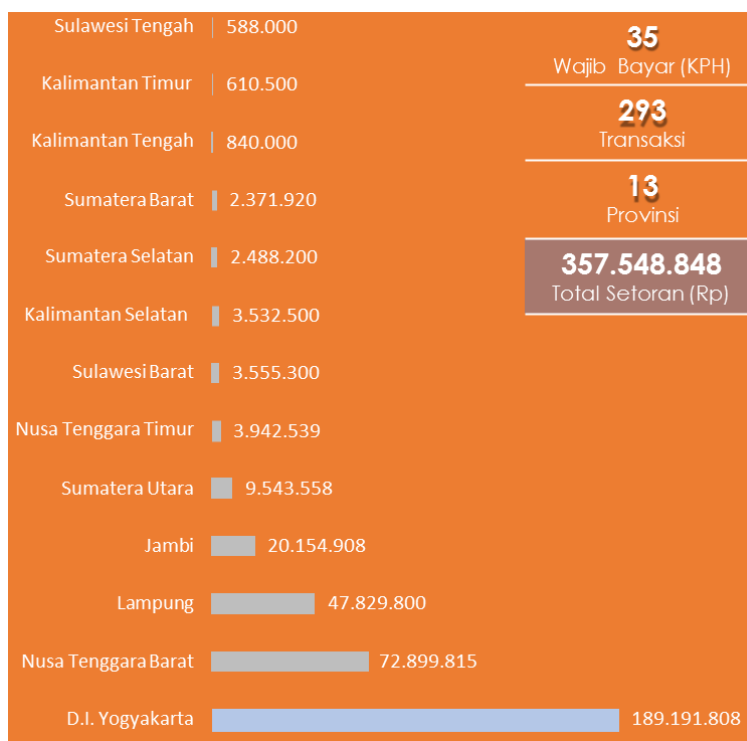
Gambar 9. Nilai METT Kawasan Konservasi Tahun 2018

Pada Tahun 2018 kinerja nilai *METT* sebesar 77,50%, presentase capaian Tahun 2015-2018 ke Tahun 2015-2019 sebesar 57,69%, dan *Year of Year* 87,50%. Hasil kinerja tersebut diperoleh atas prestasi dari 75 (tujuh puluh lima) kawasan konservasi dengan nilai *METT* minimal 70 (tujuh puluh), yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Cagar Alam, 20 (dua puluh) Taman Wisata Alam, 10 (sepuluh) Suaka Margasatwa, 1 (satu) Taman Buru, dan 11 (sebelas) Taman Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 35 (tiga puluh lima) kawasan konservasi. Secara kumulatif kinerja unit kawasan korskervasi yang pengelolaannya sudah efektif menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2015 kinerjanya hanya 22,00% (tercapai 11 (sebelas) unit kawasan konservasi dari target 50 (lima puluh)) unit kawasan konservasi), Tahun 2016 meningkat menjadi 40,00% (tercapai 40 unit kawasan korskervasi dari target 100 (seratus) unit kawasan konservasi), di Tahun 2017

sebesar 53,33% (tercapai 80 (delapan puluh) unit kawasan konservasi dari target 150 (seratus lima puluh) unit kawasan konservasi)), dan Tahun 2018 kinerja meningkat kembali menjadi 77,50% (tercapai 155 (seratus lima puluh lima) unit kawasan konservasi dari target 200 (dua ratus) unit konservasi)). Capaian 2019 diharapkan tercapai 100% dengan meningkatkan efektifitas 260 (dua ratus enam puluh) unit kawasan konservasi.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Hingga tahun 2018 kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebesar 63,19%. Persentase tersebut berasal dari ketercapaian jumlah KPH yang telah memproduksi barang dan jasa sebanyak 170 KPH, terdiri atas 89 (delapan puluh sembilan) KPHP dan 81 (delapan puluh satu) KPHL dari rencana 269 (dua ratus enam puluh sembilan) unit KPH. Pada tahun 2018 tercatat kontribusi KPH dalam PNPB sebesar 357,54 juta, yang diperoleh dari 35 unit KPH wajib bayar dengan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) transaksi yang tersebar di 13 (tiga belas) provinsi. Hal ini merupakan prestasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di sekitar KPH.

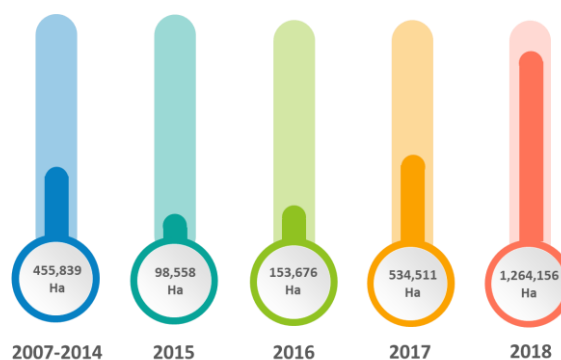


Gambar 10. Kontribusi KPH terhadap PNPB Tahun 2018

KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SENTRA PRODUKSI HASIL HUTAN

Tahun 2019 menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan rencana strategis perhutanan sosial untuk 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kumulatif capaian tersebut sampai tahun 2018 sebesar 2.506.741 Ha dengan persentase 19,74%, hasil ini sangat kecil dalam capaian kumulatif target renstra. Perhutanan sosial membuat terobosan untuk mencapai target tersebut dengan beberapa skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK), yang merupakan pengakuan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

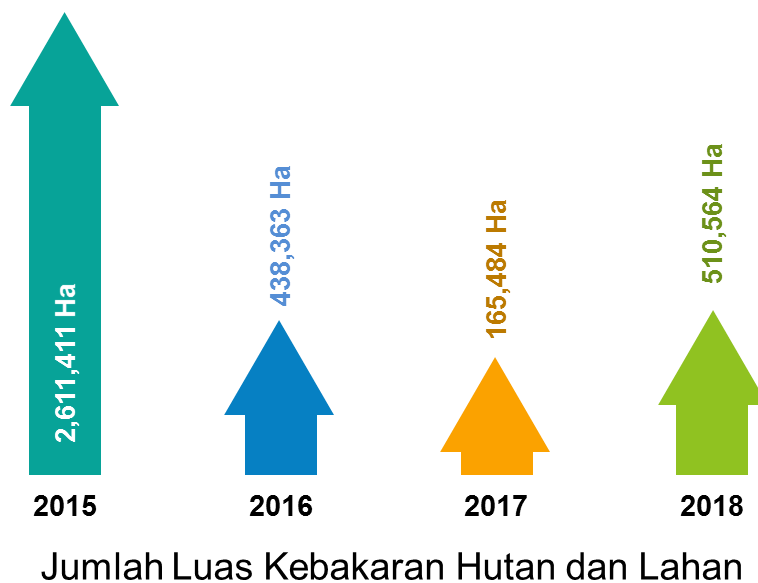
Perhutanan sosial menargetkan 2.000.000 Ha di tahun 2018 untuk mendukung capaian target renstra. Hasil yang diperoleh hanya 1.264.156 Ha untuk akses kelola hutan sosial dengan persentase 63,08%. Hasil capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan dalam akses kelola hutan sosial, namun Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan keseriusan dengan meningkatkan capaian per tahun. Kinerja Perhutanan Sosial terus mempercepat langkah, tahun 2018 capaian kinerja (Y o Y) sebesar 136,51% dari capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2017 sebesar 520.037 Ha.



Gambar 11. Luas Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Ha), Sumber Data: Laporan Kinerja 2018 Biro Perencanaan

PROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Ada 7 (tujuh) provinsi prioritas yang telah dilindungi dari bahaya kebakaran hutan di tahun 2018, dan kini kinerjanya dapat dirasakan dengan luas kebakaran hutan dan lahan yang cenderung berkurang serta jumlah hari asap melintas negara turun. Di tahun 2015 tercatat 21 (dua puluh satu) hari asap melintas negara, pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 4 (empat) hari serta di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi asap yang melintas negara. Kinerja 2018 sebesar 80,42% dan *Year of Year* turun sebesar 13,01%.



Gambar 12. Luas Kebakaran Hutan (Ha) Tahun 2015 sd 2018 , Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Biro Perencanaan

PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp. 4.181 Trilyun dari total alokasi Rp. 9.319 Trilyun pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu Alokasi

| No. | Prioritas Nasional | Alokasi 2020 (ribu) |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 390.272.174,00 |
| 2. | Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 412.970.806,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| 3. | Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 3.749.980.339,00 |
| Total | | 4.181.550.319,00 |

Sumber dana yang sudah dialokasikan tersebut dimaksimalkan untuk mencapai target kegiatan 2020 yang telah ditetapkan, untuk mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan tidak melupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menjamin ekosistem agar dalam keberadaan yang seimbang.

Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 (sembilan) Prioritas Nasional dari 10 (sepuluh) Prioritas Nasional di tingkat nasional. Data capaian Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kecakapan kerja melalui penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga peningkatan kualitas sarana pembelajaran masyarakat melalui pengembangan KHDTK. Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat 4 (empat) unit pengembangan KHDTK dan 455 (empat ratus lima puluh lima) orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.

2. Kesehatan

Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional Kesehatan yaitu melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE dan Ditjen PSLB3. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional ini yaitu: penghapusan penggunaan merkuri di 7 (tujuh) lokasi, pengamanan terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu seluas 66.105,29 Ha, dan restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di Taman Nasional Lore Lindu seluas 5 (lima) Ha.

3. Perumahan dan Energi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pencapaian dalam bidang perumahan dan energi dengan berkontribusi pada peningkatan ketersediaan air baku melalui penyediaan sumur resapan. Inisiasi ini dilakukan oleh Ditjen PDASHL yang dilaksanakan pada DAS prioritas. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada inisiasi ini yaitu 6000 (enam ribu) unit sumur resapan air di 15 (lima belas) DAS prioritas.

4. Ketahanan Energi

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan energi yaitu dengan menyediakan energi berbasis air (mini/mikrohidro) di kawasan konservasi. Pembangunan energi berbasis air ini dilakukan oleh ditjen KSDAE pada kawasan taman nasional dan non kawasan taman nasional. Pada Tahun 2018 capaian yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menghasilkan energi mini/mikrohidro di kawasan taman nasional sebesar 10.090 (sepuluh ribu sembilan puluh) Kwatt dan di kawasan non taman nasional sebesar 210 (dua ratus sepuluh) Kwatt.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu kementerian yang terjun langsung ke tingkat tapak, turut berkontribusi dalam prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu memfasilitasi kelembagaan usaha koperasi, penguatan modal usaha dan fasilitasi sertifikasi, standardisasi merek dan kemasan untuk membantu memasarkan produk hasil hutan yang dikelola masyarakat. Pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan ini yaitu Ditjen PSKL sebagai pembuat kelompok, BP2SDM sebagai pemberi pelatihan dan peningkatan ilmu untuk pengembangan usaha, serta Ditjen PHPL sebagai pemberi sertifikasi untuk melegalkan penjualan hasil hutan yang dikelola masyarakat. Tahun 2018, capaian yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak

367 unit, pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat, dan Kemitraan) yang mandiri sebanyak 2.647 kelompok, dan 152 kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK.

6. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan aktif dalam bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan. Kegiatan tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) laporan melalui Inspektorat Jenderal. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penguatan kapasitas dan pemenuhan standarisasi LPSE sebanyak 12 (dua belas) standarisasi serta penguatan *system Monev Next Generation Online* oleh Sekretariat Jenderal. Hasil dari peran aktif tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat nilai PPID sebesar 74,4 berdasarkan nilai keterbukaan informasi publik.

7. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ini yaitu dengan penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya Tarik wisata di kawasan Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika yang didukung oleh Ditjen KSDAE dan BLI dengan menciptakan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dalam rangka percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Capaian yang telah ditorehkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
- b. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
- c. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 4 (empat) unit;
- d. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
- e. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;

- f. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
- g. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
- h. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 3 (tiga) unit;
- i. Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli.

8. Ketahanan Pangan

Kegiatan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan pangan yaitu dengan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan air untuk mencegah kekeringan dan mitigasi bencana banjir. Pelaksana utama dalam kegiatan ini adalah Ditjen PDASHL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan sebagai berikut:

- a. Tersedianya bibit berkualitas sebanyak 49.549.368 batang;
- b. Tersedianya bibit produktif sebanyak 2.623.573 batang;
- c. Hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan direhabilitasi seluas 8.525 Ha;
- d. Pembuatan Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan (Dpi, DPn, dan *Gully Plug*) sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) unit.

9. Pembangunan Kewilayahan

Dalam upaya Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi melalui kegiatan penataan dan perencanaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Ditjen PKTL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan yang didukung oleh Ditjen KSDAE, PSKL, PHPL, PDASHL, dan BP2SDM. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rehabilitasi kawasan pedesaan yang rusak dan tercemar yang dilakukan oleh Ditjen PPKL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ini yaitu meningkatnya keanekaragaman hayati dengan peningkatan populasi

spesies terancam punah sebanyak 32,04%, penanganan konflik tenurial seluas 504.486 Ha, kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan seluas 88,20 juta Ha, penanggulangan kebakaran di 26 (dua puluh enam) unit kawasan konservasi non taman nasional dan 48 (empat puluh delapan) unit di taman nasional, serta melaksanakan pemulihan gambut seluas 307.953 Ha.

V. PENGARUSUTAMAAN

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Pemerintah yang baik; Kesetaraan Gender; Modal Sosial Nudaya; Transformasi Digital; Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

a. Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Pengarusutamaan Gender

Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui:

a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;

- b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
 - c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
 - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan
 - f. Penyediaan sarana prasarana yang responsif gender.
- d. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya
- Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.
- e. Pengarusutamaan Transformasi Digital
- Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan *Big Data*.
- f. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana.
- Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim pada sektor-sektor prioritas yaitu:
1. ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir;
 2. ketahanan iklim sektor air;
 3. ketahanan iklim sektor pertanian; dan
 4. ketahanan iklim sektor kesehatan.

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2020 dibuat untuk menjadi acuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan sarana transisi untuk menyambung RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2020 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi menggerakkan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Rencana Kerja Tahun 2020 telah memasukkan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa Rencana Kerja Eselon I atau Eselon II atau Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sarana mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

Matriks Rencana dan Kegiatan
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

| Program/ Kegiatan | Sasaran | Indikator (Output) | Target/ Satuan | Prioritas Nasional | Proyek Prioritas | Kegiatan Prioritas | Proyek Prioritas Nasional | Prioritas Bidang | Lokasi | Alokasi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 029.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK | | | | | | | | | 592.759.666,00 |
| 5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK | 01- Terinformasikannya kebijakan, program, kegiatan, dan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan | | | | | | | | | 10.094.400,00 |
| | | 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 10.094.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---|----------------------|----------------|
| 5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK | 01-Tersedianya Data dan Informasi yang Valid dan Mudah Diakses | | | | | | | | | 30.141.268,00 |
| | | 001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center | 2-Sistem | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 23.287.668,00 |
| | 02-Terlaksananya Layanan Data dan Informasi | | | | | | | | | |
| | | 963-Layanan Data dan Informasi | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 6.853.600,00 |
| 5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi | 01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan | | | | | | | | | 67.479.233,00 |
| | | 003-Forest and Climate Change Programme Financial Cooperation | 95-% dana tersalurkan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 39.219.233,00 |
| | | 952-Layanan Perencanaan | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 28.260.000,00 |
| 5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK | 01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan | | | | | | | | | 268.646.040,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta | 1.480.000,00 |
| | | 956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan | Provinsi DKI Jakarta | 5.234.924,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|---|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | hidup | | |
| | | 962-Layanan Umum | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta | 39.207.709,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta | 222.723.407,00 |
| 5371-Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T pelaku usaha kehutanan dalam rangka RHL mitra KPH dan non KPH (HTI, HTR, HKm, HD, HR dan HHBK). | | | | | | | | | 68.350.000,00 |
| | | 001-Dana bergulir yang terdistribusi | 500-Milyar Rupiah | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 63.253.000,00 |
| | | 002-Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan BLU Pusat P2H | 124-Milyar Rupiah | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 5.097.000,00 |
| 5372-Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri | 01-Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK | | | | | | | | | 14.504.909,00 |
| | | 964-Layanan Kerjasama Internasional | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 13.504.909,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 5-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.704.947,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.573.687,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Bali | 471.366,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Bali | 10.442.308,00 |
| 5375-Pengendalian Ekoregion Kalimantan | 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Kalimantan | | | | | | | | | 14.622.952,00 |
| | | 001-Layanan Pengendalian Ekoregion | 5-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara | |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | 64-Provinsi Kalimantan Timur | 1.750.000,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 64-Provinsi Kalimantan Timur | 1.000.000,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 64-Provinsi Kalimantan Timur | 8.872.952,00 |
| 5376-Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku | 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Sulawesi dan Maluku | | | | | | | | | 17.332.730,00 |
| | | 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 2-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi | 3.221.785,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 5-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | 4.550.000,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 2-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | 1.800.000,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Papua | 400.000,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Papua | 7.185.688,00 |
| 5379-Pengendalian Ekoregion Sumatera | 01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion | | | | | | | | | 17.464.340,00 |
| | | 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 7-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, | 3.975.870,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta | |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta | 1.051.890,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Riau | 472.240,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, | 11.964.340,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua | |
| 5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK | 01-Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK | | | | | | | | | 5.000.000,00 |
| | | 004-Dokumen Manajemen Pengelolaan PNBK dan Piutang KLHK | 4.2-Trilyun Rupiah | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 2.605.000,00 |
| | | 955-Layanan Manajemen Keuangan | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 2.395.000,00 |
| 5381-Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK | 01-Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | | | | 9.983.800,00 |
| | | 960-Layanan Manajemen Organisasi | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi DKI Jakarta | 1.951.024,00 |
| | | 961-Layanan Reformasi Birokrasi | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi DKI Jakarta | 245.412,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|--|--|--|---|-------|---------------|
| | | 001-Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum bidang LHK yang tertangani | 40-Perkara | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 800.000,00 |
| 5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Tersedianya Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | | | | 11.786.826,00 |
| | | 001-Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis | 12-Dokumen Rancangan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.700.000,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.340.400,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 6.446.426,00 |
| | 02-Tersedianya Indeks Kualitas Kebijakan KLHK | | | | | | | | | |
| | | 002-Kualitas Kebijakan KLHK | 70-POIN | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 300.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|--|--|--|---|-------|---------------|
| 5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien | | | | | | | | | 3.665.700,00 |
| | | 001-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH | 3-Dokumen | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 3.665.700,00 |
| 029.02.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi | | | | | | | | | 86.966.609,00 |
| 5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK | 01-Penjamin Kualitas Pengawasan | | | | | | | | | 60.938.603,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.829.484,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 35.591.066,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------|--|--|--|--|---|-------|---------------|
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 21.518.053,00 |
| 5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I | 01-Pengawasan yang akuntabel | | | | | | | | | 4.873.270,00 |
| | | 965-Layanan Audit Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.873.270,00 |
| 5386-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II | 01-Pengawasan yang akuntabel | | | | | | | | | 4.939.058,00 |
| | | 965-Layanan Audit Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.939.058,00 |
| 5387-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III | 01-Pengawasan yang akuntabel | | | | | | | | | 5.649.268,00 |
| | | 965-Layanan Audit Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 5.649.268,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|--|--|---|-------|----------------|
| 5388-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV | 01-Pengawasan yang akuntabel | | | | | | | | | 5.155.490,00 |
| | | 965-Layanan Audit Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 5.155.490,00 |
| 5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN | 01-Pengawasan yang akuntabel | | | | | | | | | 5.410.920,00 |
| | | 002-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat | 100-Persen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.500.000,00 |
| | | 003-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK | 15-Persen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.910.920,00 |
| 029.03.06-Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan | 01-Meningkatkan tata kelola Hutan Produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien | | | | | | | | | 301.754.834,00 |
| | 02-Mengembangkan multi bisnis Hutan Produksi yang kompetitif | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|-------|---------------|
| | 03-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | |
| 5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari | 01-Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari | | | | | | | | | 77.780.014,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 25.488.712,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 5.316.000,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 46.975.302,00 |
| 5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi | 01-Areal Hutan Produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi | | | | | | | | | 8.264.550,00 |
| | | 001-SK Menteri penerbitan RPHJP | 20-Unit | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 2.950.800,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|--|--|-----------------------------|---|-------|----------------|
| | | 001-Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan (SK) | 30-Izin | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.147.114,00 |
| | | 002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan | 160-Kelompok | 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | 01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir | 06-Optimalisasi Hasil Hutan | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 10.000.000,00 |
| | | 003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan | 15-Juta ton | 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | 01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir | 06-Optimalisasi Hasil Hutan | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 2.248.600,00 |
| | | 004-Nilai ekspor produk industri kehutanan | 9-USD Miliar | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 251.400,00 |
| 5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan | 01-Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan | | | | | | | | | 174.287.406,00 |
| | | 002-KPHP Maju | 10-Unit KPHP | | | | | 01-Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang | Pusat | 41.637.036,00 |
| | | 003-Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja | 34-Provinsi | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 18.141.307,00 |
| | | 004-Investasi Khusus (HLN) | 12-Unit KPHP | | | | | 00-Bukan prioritas | Pusat | 11.037.544,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, | 74.676.452,00 |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|--|---|--|---|--|------------------|
| | | 001-Dokumen Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif dan Sipil Teknis | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 6.738.300,00 |
| | | 002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif | 56000-Ha | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya | 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, | 1.939.605.401,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|--|---|--|---------------------------|--|---------------|
| | | 003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis | 3000-Unit | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya | 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo | 61.701.277,00 |
| | | 004-Pembinaan Forest Program II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) | 1-Kegiatan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat dan Provinsi Jambi | 50.957.750,00 |
| | | 005-Forest Programme III (BPDASHL Palu-Poso) | 1-Kegiatan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 16.768.334,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|--|---|--|---------------------------|---|---------------|
| | | 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai | 1000-Ha | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi | 25.151.840,00 |
|--|--|--|---------|---|--|---|--|---------------------------|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | | | | | | | Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua | |
| 5405-Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung | 01-Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari | | | | | | | | | 41.337.771,00 |
| | | 001-Dokumen pembinaan KPHL dan produksi HHBK | 7-Kegiatan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.667.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | 002-KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju | 10-KPH | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi | 28.984.191,00 |
|--|--|---|--------|--|--|--|--|---|--|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 003-Pembinaan Forest Programme IV Sulawesi Barat | 2-BPDASHL | | | | | 01-Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang | Pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat | 4.000.200,00 |
| | | 004-Produksi HHBK | 3000-Ton | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa | 3.686.380,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat | |
| 5406-Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS | 01-Menurunnya Kekritisn DAS Prioritas | | | | | | | | | 91.093.589,00 |
| | | 001-Dokumen Informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana dan Peningkatan kapasitas lembaga/forum peduli DAS | 1-Dokumen | | | | | 01-Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang | Pusat | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 002-Jumlah Informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana | 34-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, | 78.926.017,00 |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|--|---|--|---------------------------|---|--------------|
| | | 003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya | 34-lembaga/ forum | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya | 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan | 7.167.572,00 |
|--|--|---|-------------------|---|--|---|--|---------------------------|---|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| 5407-Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan | 01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan | | | | | | | | | 186.437.646,00 |
| | | 001-Dokumen Pembinaan Penyediaan Benih berkualitas, Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif serta Sumber benih unggul yang dibangun | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.350.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 002-Sumber benih unggul yang dibangun | 100-Hektar | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi | 14.923.147,00 |
|--|--|---------------------------------------|------------|--|--|--|--|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | | 003-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif | 42500000-Batang | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan | 153.245.413,00 |
|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 004-Benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat | 100000000-butir | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi | 13.919.086,00 |
|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|--|--|--|---------------------------|--|---------------|
| 5408-Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat | 01-Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas | | | | | | | | 25.137.954,00 |
| | | 008-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat | 34-Unit | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara | 5.510.449,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|--|---|-----------------------|---|-------|--------------|
| | 02-Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas | | | | | | | | | |
| | | 005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat | 1-Dokumen | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya | 07-Revitalisasi Danau | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---------------------------|---|---------------|
| | | 007-Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat | 34-Dokumen | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan | 13.767.505,00 |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---------------------------|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 009- Lembaga/komunitas peduli danau | 30- Lembaga/Kelompok | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan, dan | 1.860.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem | 01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE | | | | | | | | 1.208.802.249,00 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, | 92.498.684,00 |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|--|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, | 78.884.890,00 |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|--|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|--|--|--|--|---|--|------------------|
| | | | | | | | | | Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.037.418.675,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---|--|---------------------------|---|--|--------------|
| 5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam | 01-Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam | | | | | | | 47.307.962,00 | |
| | | 002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi | 4145541-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) | 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa | 6.811.800,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------|
| | | 003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi | 54-Dokumen | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi | 12.930.245,00 |
|--|--|---|------------|---|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 004-Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi | 54-Unit KK | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 5.910.037,00 |
| | | 007-Forest Programme III (Direktorat PIKA) | 1-Kegiatan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah | 21.655.880,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------|---|--|---|--|---|---|----------------|
| 5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi | 01-Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru | | | | | | | | | 349.697.306,00 |
| | | 001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya | 1800000-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya | 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan | 120.888.741,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|--|---------------------------|---|---|--|---------------|
| | | 002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | 900-Desa | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi | 74.724.588,00 |
|--|--|---|----------|---|--|---------------------------|---|---|--|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|---------------------------|---|---|--|----------------|
| | | 003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya | 552-Unit KK | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi | 119.361.961,00 |
|--|--|--|-------------|---|--|---------------------------|---|---|--|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 004-Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi | 30-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 6.030.344,00 |
| | | 010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem | 1-Kegiatan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 10.100.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|---|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 011-Forest Programme II Sumatera | 2-Kegiatan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jambi | 18.591.672,00 |
| 5422-Konservasi Spesies dan Genetik | 01-Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik | | | | | | | | | 99.918.203,00 |
| | | 001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 22000000-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa | 87.591.893,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|-----------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | | | | Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 60-Unit | 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | 01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir | 06-Optimalisasi Hasil Hutan | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, | 1.001.150,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|---|---|---------------------------|--|----------------|
| | | 001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan | 18-Destinas | 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | 04-Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok | 01-Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi | 179.691.956,00 |
|--|--|--|-------------|--|--|---|---|---------------------------|--|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|--|---------------------------|---|---------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam | 20-unit | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Tengah, Provinsi DI | 8.619.796,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|--|---------------------------|---|---|---|--------------|
| | | 001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi | 6468953-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi | 4.100.800,00 |
|--|--|--|----------------|---|--|---------------------------|---|---|---|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|---------------------------|---|---|--|--------------|
| | | | | | | | | | Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya | 14-Unit KEE | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan | 8.077.500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara | |
| | | 003-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial | 17-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 7.394.651,00 |
| 029.06.09-Program Planologi dan Tata Lingkungan | 01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual | | | | | | | | | 480.427.464,00 |
| | 02-Tersedianya Data dan Informasi SDH | | | | | | | | | |
| | 03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | 04-Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung | | | | | | | | | |
| | 05-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi | | | | | | | | | |
| 5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024 | | | | | | | | | 253.178.801,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 16.432.343,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi | 7.953.634,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|--|---|---------------|
| | | | | | | | | | Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 970-Layanan Dukungan Manajemen Satker | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan | 20.276.657,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi | 208.516.167,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---|---------------------------|---|---|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| 5433-Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | 01-Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan | | | | | | | | | 145.736.857,00 |
| | | 001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan | 5-Juta Hektar | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.744.370,00 |
| | | 004-Infomasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan | 1-Judul | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 270.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---------------------------|---|---|---|---|---------------|
| | | 007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga | 5225-Km | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua | 57.479.479,00 |
|--|--|--|---------|---|---------------------------|---|---|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---|---------------------------|---|--|---|---|--------------|
| | 02-Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan | | | | | | | | | |
| | | 005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan | 48-Pemohon | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 561.470,00 |
| | | 008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH | 3-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo | 3.080.833,00 |
| | 03-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA | | | | | | | | | |
| | | 002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA | 130000-Hektar | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 2.077.610,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|--|---------------------------|---|---|---|---------------|
| | | 001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan | 11-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.870.508,00 |
| | | 004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH | 182-Klaster | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, | 13.652.323,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | 005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH | 22-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, | 6.672.479,00 |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|---|--|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|--|---------------------------|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | |
| 5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | 01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH | | | | | | | | | 46.063.689,00 |
| | | 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP | 530-Peta | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 450.000,00 |
| | | 007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project | 1-Laporan | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 20.100.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---|-------|--------------|
| | 02-Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi | | | | | | | | | |
| | | 004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 | 10-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 2.779.270,00 |
| | 03-Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi | | | | | | | | | |
| | | 001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.670.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | 013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 19-Laporan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, | 6.649.172,00 |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|---|--|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|--|---|--|---|--|---------------|
| | | | | | | | | | dan Provinsi Papua | |
| | 06-Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | | | | | | | | | |
| | | 011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | 1-Dokumen | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 917.950,00 |
| | 07-Terfasilitasnya penyusunan Rencana Kelola KPH | | | | | | | | | |
| | | 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH | 22-KPH | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan | 13.497.297,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|--|---------------------------|---|---|---|--------------|
| | | 010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air | 65-Juta Ha | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.500.000,00 |
| | | 011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH | 7-Dokumen | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua | 847.807,00 |
| 5437-Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | 01-Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan | | | | | | | | | 4.535.000,00 |
| | | 001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | 60-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.785.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|--|---------------------------|---|---|---------------------|----------------|
| | | 006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi | 5-Provinsi | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 01-Penataan Kawasan Hutan | 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 750.000,00 |
| 029.07.04-Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | 393.833.245,00 |
| | 02-Peningkatan IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan | | | | | | | | | |
| | 03-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Litbang | | | | | | | | | |
| | 04-Tersedianya Produk Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif | | | | | | | | | |
| 5390-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi | 01-Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | | | | | | | | | 98.873.291,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Jawa Barat | 11.930.611,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--|--|--|--|---|---------------------|---------------|
| | 03-Terselenggaranya layanan perkantoran | | | | | | | | | |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jawa Barat | 86.942.680,00 |
| 5391-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan | 01-Tersedianya produk hasil Litbang pengelolaan hutan yang inovatif dan implementatif | | | | | | | | | 28.885.000,00 |
| | | 001-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan | 7-Produk | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jawa Barat | 1.328.500,00 |
| | 04-Terkelolanya KHDTK dan Hutan Penelitian | | | | | | | | | |
| | | 004-Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian | 4-Unit | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jawa Barat | 335.000,00 |
| | 05-Terkelolanya Laboratorium Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | |
| | | 005-Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan Hutan | 4-Laboratorium | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jawa Barat | 122.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|---------------|
| | | 001-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan | 4-Produk | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Banten | 622.537,00 |
| | 04- Tersedianya laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan kajian baku mutu kualitas lingkungan | | | | | | | | | |
| | | 002-Pengembangan Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional | 1-Laboratorium Lingkungan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Banten | 324.990,00 |
| | 06-Terselenggaranya layanan perkantoran | | | | | | | | | |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Banten | 20.909.407,00 |
| | 07-Terbangunnya Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan | | | | | | | | | |
| | | 003-Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan | 1-Laboratorium Riset | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Banten | 73.990.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|--|--|---|---------------------|----------------|
| | 08-Terlaksananya layanan internal | | | | | | | | | |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 36-Provinsi Banten | 386.000,00 |
| | 09-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen | | | | | | | | | |
| | | 004-Layanan Dukungan Manajemen | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Banten | 500.195,00 |
| 5394-Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim | 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim | | | | | | | | | 1.282.908,00 |
| | | 001-Penelitian dan Pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim | 11-Produk | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jawa Barat | 1.282.908,00 |
| 5395-Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker) | 01-Tersedianya produk hasil penelitian Integratif di daerah | | | | | | | | | 166.701.916,00 |
| | | 001-Penelitian Integratif dan Pengembangan Tematik Daerah | 45-Produk | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 5.442.981,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | 04-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) BLI | | | | | | | | | |
| | | 003-KHDTK dan Hutan Penelitian | 31-Unit | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.812.617,00 |
| | 05-Terselenggaranya Layanan Perkantoran | | | | | | | | | |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 15-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan | 152.617.644,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan | |
| | 06-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker | | | | | | | | | |
| | | 970-Layanan Dukungan Manajemen Satker | 15-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi | 6.828.674,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan | |
| 029.08.10-Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | 01-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat | | | | | | | | | 341.386.089,00 |
| 5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM | | | | | | | | | 165.789.655,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi | 25.105.830,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan | |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan | 8.949.645,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan | 131.734.180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--|--|--|--|---|---|---------------|
| 5440-Perencanaan dan Pengembangan SDM | 01-Tersedianya SDM tenaga teknis dalam mendukung operasionalisasi KPH dan SDM LHK kompeten | | | | | | | | | 7.240.350,00 |
| | | 001-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK | 5-Jenis Jabatan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.470.175,00 |
| | | 002-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK | 5-Jenis Jabatan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 1.720.175,00 |
| | | 003-SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya | 1000-Orang | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 4.050.000,00 |
| 5441-Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK | 01-Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | | | | 36.542.324,00 |
| | | 001-SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya | 3260-orang | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan | 28.112.324,00 |
| | | 002-SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa | 45-orang | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jawa Barat | 4.500.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|---|---|--|---|---|----------------|
| | | 003-Nilai KHDTK yang dikelola | 55-poin | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan | 3.930.000,00 |
| 5442-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan | 01-Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan | | | | | | | | | 109.375.000,00 |
| | | 001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia | 472-orang | 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 03-Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja | 02-Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat | 74.256.350,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat | 35.118.650,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---|---------------------------|---|---|---|--|---------------|
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 44.125.345,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 4.857.890,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 59.964.270,00 |
| 5414-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial | 01-Meningkatnya luas areal kelola masyarakat | | | | | | | | | 51.466.930,00 |
| | | 001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS | 500000-Hektar | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 8.500.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---|---------------------------|---|--|---|---|----------------|
| | | 003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS | 500000-Hektar | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 26.662.680,00 |
| | | 004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi | 300-SK | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 7.500.000,00 |
| | | 006-Penyiapan kawasan PS melalui Hibah Luar Negeri | 12-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jambi | 8.804.250,00 |
| 5415-Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat | 01-Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial | | | | | | | | | 235.270.111,00 |
| | | 001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk | 1000-KUPS | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 05-Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 10.000.000,00 |
| | | 002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan | 1470-Paket | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 06-Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi | 106.721.660,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | Selatan, dan Provinsi Maluku | |
| | | 005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan | 107-KUPS | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 21.700.000,00 |
| | | 006-Pengembangan usaha kelompok PS melalui Hibah Luar Negeri | 4-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah | 90.424.631,00 |
| | | 007-Pembinaan Pengembangan usaha perhutanan sosial | 11-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 6.423.820,00 |
| 5416-Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat | 01-Meningkatnya mitra dan peran serta masyarakat dalam pendampingan perhutanan sosial | | | | | | | | | 43.795.330,00 |
| | | 001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan | 125-Mitra | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi | 6.625.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|---|---------------------------|---|---|---------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | Selatan, dan Provinsi Maluku | |
| | | 002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial | 1250-Pendamping | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 37.170.330,00 |
| 5417-Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat | 01-Meningkatnya penanganan konflik tenurial bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan | | | | | | | | | 19.199.324,00 |
| | | 001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan | 40-Kasus | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 3.900.000,00 |
| | | 002-Kasus konflik tenurial yang ditangani | 35-Kasus | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 4.200.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---------------------------|---|---|---|--|----------------|
| | | 003-Hutan Adat yang ditetapkan | 20-SK | 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 04-Pengentasan Kemiskinan | 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial | 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 7.250.000,00 |
| | | 004-Pembinaan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat | 5-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku | 2.608.344,00 |
| | | 005-Penanganan konflik tenurial dan verifikasi Hutan Adat melalui Hibah Luar Negeri | 4-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Jambi | 1.240.980,00 |
| 029.10.12-Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penerapan instrumen penegakan hukum lingkungan | | | | | | | | | 468.790.771,00 |
| | 03-Meningkatnya keamanan hutan yang menjamin kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|--|--|--|---|--|----------------|
| 5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Terwujudnya reformasi tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK | | | | | | | | | 173.019.771,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 26.012.009,00 |
| | | 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta | 2.250.000,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 144.757.762,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|--|--|---|---|--|---------------|
| | | 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan | 46-Kasus | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi DKI Jakarta | 22.461.000,00 |
| 5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | 01-Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi | | | | | | | | | 62.830.000,00 |
| | | 001-USaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK | 1000-Perusahaan | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 52.830.000,00 |
| | | 002-PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya | 200-Orang | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi DKI Jakarta | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|--|--|--|---|--|----------------|
| 5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01-Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional | | | | | | | | | 73.575.000,00 |
| | | 001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 | 173-Kasus | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 00-Bukan prioritas bidang | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 56.986.250,00 |
| | | 002-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya | 210-Orang | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 16.588.750,00 |
| 029.11.13-Program Pengendalian Perubahan Iklim | 01-Peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | | | 313.272.831,00 |
| | 03-Penurunan luas areal kebakaran hutan/lahan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|---|--|--|---|---|--|---------------|
| | | 001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim | 1-Dokumen | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 2.100.000,00 |
| | | 002-Program Kampung Iklim | 30-Desa | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 1.100.000,00 |
| 5447-Mitigasi Perubahan Iklim | 01-Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di 5 (lima) sektor dan penghapusan Bahan Perusak Ozon | | | | | | | | | 11.000.000,00 |
| | | 003-Kebijakan Pengendalian konsumsi bahan perusak ozon | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Papua Barat | 1.310.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | 005-HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project | 3-Perusahaan | | | | | 01-Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang | Pusat | 7.690.000,00 |
| | | 007-Data pemantauan capaian aksi mitigasi yang tervalidasi | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 2.000.000,00 |
| 5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi | 01-Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun | | | | | | | | | 4.250.000,00 |
| | | 001-Data Inventarisasi GRK Dan Verifikasi Serta Registri Yang Termutakhirkan | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 4.250.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|--|--|---|---|--|----------------|
| 5449-Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim | 01-Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon | | | | | | | | | 5.000.000,00 |
| | | 001-Kapasitas Sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan | 300-Orang | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 2.000.000,00 |
| | | 006-Kebijakan sumberdaya pendanaan dan perundingan perubahan iklim | 1-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.000.000,00 |
| 5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | 01-Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla | | | | | | | | | 182.892.813,00 |
| | | 004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | 1200-Desa | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat | 150.502.813,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|--|--|--|---|-------|---------------|
| 5451-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | 01-Terkelolanya pemerintahan yang baik melalui pelayanan internal di lingkungan Ditjen PSLB3 | | | | | | | | | 59.516.139,00 |
| | | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 22.672.224,00 |
| | | 994-Layanan Perkantoran | 1-Layanan | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 36.843.915,00 |
| 5452-Pengelolaan B3 | 01-Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar | | | | | | | | | 15.600.000,00 |
| | | 002-Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun | 6000000-ton | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 1.900.000,00 |
| | | 003-Pengurangan dan Penghapusan Senyawa POPs | 1-Jenis B3 | | | | | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat | 850.000,00 |
| | | 004-Pembentukan Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3 dan Senyawa POPs | 1-Sistem | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 850.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|--|--|---|---|---|---------------|
| | 02-Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk kegiatan penambangan emas skala kecil | | | | | | | | | |
| | | 001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK | 5-unit | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara | 12.000.000,00 |
| 5453-Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 01-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun | | | | | | | | | 9.100.000,00 |
| | | 001-Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 400-Industri | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.600.000,00 |
| | | 002-Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 3-Dokumen | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 4.500.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|---|--|--|--|---|---|---------------|
| 5454-Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 01-Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) | | | | | | | 102.840.000,00 | | |
| | | 004-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan | 5-Unit | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua | 76.140.000,00 |
| | 02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun | | | | | | | | | |
| | | 002-Pembinaan pengelolaan limbah B3 untuk usaha/kegiatan | 500-Usaha kegiatan | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 8.350.000,00 | |
| | 03-Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|---|--|--|---|---|--|----------------|
| | | 002-Pembangunan Sistem Penanganan Kedaruratan Limbah B3 | 1-sistem | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 3.550.000,00 |
| 5456-Pengelolaan Sampah | 01-Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 86.990.000 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah) | | | | | | | | | 143.938.000,00 |
| | | 001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional | 126080-Ton | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 16.050.000,00 |
| | 02-Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 252.420.000 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah) | | | | | | | | | |
| | | 002-Peningkatan Penanganan Sampah Nasional | 41400-Ton | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi | 29.800.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|--|---|--|---|--|---------------|
| | | | | | | | | | Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sulawesi Utara | |
| | | 003-Penanganan Sampah Melalui Evaluasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat Berkelanjutan (ADIPURA) | 14039600-Ton | | | | | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat | 63.450.000,00 |
| | | 005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum | 4464-Ton | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | 06-Citarum Harum | 03-Modernisasi Pengelolaan Sampah | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat dan Provinsi Jawa Barat | 12.038.000,00 |
| | 03-Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun | | | | | | | | | |
| | | 004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut | 13650-Ton | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 02-Penanggula n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi | 22.600.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|---|--|--|---|---|---|---------------|
| | | 005-Data dan Informasi Kualitas Udara | 510-Lokasi | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan | 31.050.000,00 |
|--|--|---------------------------------------|------------|---|--|--|---|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|---|--|--|---|---|---|---------------|
| | | 010-Data dan Informasi Kualitas Air | 631-Titik | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan | 96.439.210,00 |
|--|--|-------------------------------------|-----------|---|--|--|---|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|--|--|--|---|---|---------------|
| | | 012-Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air | 49-Unit | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, | 50.000.000,00 |
|--|--|---|---------|---|--|--|--|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|--|---|---|---------------------------|---|---------------|
| | | 006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | 34-Provinsi | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01-Pencegahan dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara | 00-Bukan prioritas bidang | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan | 15.229.600,00 |
|--|--|---|-------------|---|--|---|---|---------------------------|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|--|--|--|---|---|--------------|
| | | 007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | 34-Provinsi | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, | 4.170.400,00 |
|--|--|---|-------------|---|--|--|--|---|---|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|--|---|---|---|---|---------------|
| | | 001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan | 77.5-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi | 57.138.675,00 |
|--|--|---|-------------|---|--|---|---|---|---|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|----------------|
| | | 001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi | 1800-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01- Pemulihan Gambut | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara | 19.550.000,00 |
| | 02-Pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan | | | | | | | | | |
| | | 003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan | 300000-Hektar | 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup | 04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01- Pemulihan Gambut | 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi | 300.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | | | Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua | |
| Total | | | | | | | | | | 9.319.325.816,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA